



## ANALISIS PERKEMBANGAN REGULASI DAN STANDAR DI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Ayus Lestari Siregar<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author : [ayu088768@gmail.com](mailto:ayu088768@gmail.com)

### ABSTRACT

In today's era of openness, information plays a crucial role. It is an effective means of communication between members of the public, or between a particular entity and the surrounding community. In such circumstances, the presentation of comprehensive information will create transparency and, in turn, realize public accountability. This research uses the library research method, often referred to as the library research method. This approach relies on and analyzes existing literature. This involves searching, selecting, evaluating, and interpreting written sources relevant to the research topic being studied. The stages of drafting public regulations include identifying problems, discussing solutions, drafting regulations, discussing them, and establishing regulations. This is crucial to ensure that the resulting regulations are relevant and effective in addressing existing issues. Research by Neni Machfira and Tesa Sanjaya demonstrates the importance of analyzing public sector financial reports and the influence of financial regulations on budget absorption. Research by Rahmadhani highlights the need to implement public accounting standards to ensure compliance with existing regulations. Therefore, the development of regulations and standards in the public sector is crucial to achieve good governance, transparency and accountability necessary for the benefit of society and the overall development of the country.

### Keywords

*Public Accountability, Public Regulations, Identifying*



This work is licensed under a

[Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](#)

## PENDAHULUAN

Pada era keterbukaan seperti sekarang ini, informasi berperan sangat penting bagi kita. Informasi merupakan sarana komunikasi efektif antara anggota masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya atau antara suatu entitas tertentu dengan masyarakat di sekitarnya. Pada kondisi tersebut, penyajian informasi yang utuh akan menciptakan transparansi dan pada gilirannya akan mewujudkan akuntabilitas publik.

Seperti yang kita ketahui, bahwa aktivitas organisasi sektor publik mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Dalam hal tersebut, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, organisasi sektor publik perlu diatur dengan menciptakan peraturan-peraturan. Nantinya, regulasi ini akan bersifat lebih

detail dibandingkan dengan regulasi yang mengatur sektor komersial mengingat sifatnya yang memengaruhi kepentingan orang banyak. Selain itu, sebagai organisasi yang mengelola dana masyarakat, organisasi sektor publik juga seharusnya mampu memberikan pertanggungjawaban publik melalui laporan keuangannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan komersial, informasi berupa laporan keuangan tersebut seharusnya merupakan hasil dari sebuah proses akuntansi.

Untuk kepentingan tersebut, dibutuhkan standar akuntansi yang dimaksudkan menjadi acuan dan pedoman bagi para akuntan yang berada dalam organisasi sektor publik. Standar Akuntansi merupakan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum. Maksud dari Berlaku umum adalah bahwa laporan keuangan suatu organisasi dapat dimengerti oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Penjelasan tentang hal ini terdapat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1. yang menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat berdasarkan standar akuntansi tetap bisa memenuhi kebutuhan semua pengguna yang meliputi investor sekarang, investor potensial, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, kreditor lainnya, pemerintah dan lembaga-lembaganya, serta masyarakat.

Dalam konteks lain, PABU yang telah diwujudkan dalam bentuk standar akan membantu para akuntan dalam menerapkan prinsip-prinsip yang konsisten pada entitas yang berbeda. PABU merupakan standar yang harus diikuti dimanapun profesi akuntan berada, kecuali jika keadaan membenarkan adanya pengecualian terhadap standar yang ada. Jika manajemen suatu perusahaan atau organisasi merasa bahwa keadaan yang dihadapi tidak memungkinkan adanya ketaatan terhadap standar yang ada, maka pengecualian dapat dilakukan, tentu saja disertai dengan pengungkapan yang memadai.

Standar yang digunakan pada organisasi sector public berbeda dengan standar yang diterapkan pada organisasi profite oriented. Pada organisasi sektor publik. setiap standar yang dibuat mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) merupakan standar akuntansi sektor publik yang berlaku secara internasional. Setiap organisasi publik pasti menghadapi berbagai isu dan permasalahan baik yang berasal dari luar (lingkungan) maupun dalam organisasi. Karena itu,

Setiap organisasi publik pasti mempunyai regulasi publik sebagai wujud kebijakan organisasi dalam menghadapi isu dan permasalahan yang dihadapinya. Semua proses yang terangkai mulai dari perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelaporan keuangan dan audit perlu adanya regulasi. Sehingga organisasi publik pun menggunakan regulasi publik sebagai alatuntuk memperlancar jalannya siklus akuntansi sektor publik agar tujuan organisasi dapat tercapai.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian menggunakan Metode penelitian studi pustaka, atau yang sering disebut juga dengan metode penelitian kepustakaan, adalah pendekatan penelitian yang mengandalkan analisis dan sintesis terhadap literatur yang sudah ada. Ini melibatkan pencarian, pemilihan, evaluasi, dan interpretasi sumber-sumber tertulis yang relevan

dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Tujuan utamanya adalah untuk memahami, menyusun, dan menyajikan pengetahuan yang ada tentang topik tertentu, serta mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan atau arah penelitian yang baru. Metode ini dapat digunakan sebagai pendekatan tunggal dalam sebuah penelitian atau sebagai tahap awal dalam penelitian yang lebih luas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. SEJARAH REGULASI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK**

Sejarah regulasi keuangan sektor publik mencakup perkembangan berbagai undang-undang, kebijakan, dan lembaga yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi pengelolaan keuangan pemerintah serta memastikan stabilitas sistem keuangan negara. Berikut adalah beberapa tonggak sejarah penting dalam regulasi keuangan sektor publik:

1. Abad ke-18 dan 19: Pada periode ini, regulasi keuangan sektor publik masih terbatas, dan pengelolaan keuangan negara cenderung terpusat pada pemerintah pusat atau monarki. Contohnya, di Inggris, terdapat perkembangan sistem pertabuharaan dan pembentukan Bank of England pada abad ke-17 yang menjadi langkah awal menuju regulasi keuangan yang lebih terorganisir.

2. Abad ke-20: Periode ini menyaksikan pertumbuhan kompleksitas keuangan publik, terutama setelah Perang Dunia II. Negara-negara mulai memperkenalkan undang-undang dan lembaga yang lebih formal untuk mengatur keuangan publik, seperti pengawasan bank sentral, pembentukan lembaga keuangan negara, dan pembentukan badan pengawas keuangan. Depresi Besar dan Pasca-Perang Dunia II: Krisis ekonomi global pada Depresi Besar mendorong banyak negara untuk memperkenalkan regulasi keuangan yang lebih ketat untuk menghindari krisis serupa di masa depan. Pasca-Perang Dunia II, pembentukan organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menjadi penting dalam mempromosikan kerja sama internasional dalam regulasi keuangan.

3. Reformasi Keuangan Pasca-Krisis: Krisis keuangan besar, seperti Krisis Keuangan Asia (1997-1998) dan Krisis Keuangan Global (2007-2008), memicu reformasi besar dalam regulasi keuangan sektor publik di banyak negara. Ini termasuk peningkatan pengawasan institusi keuangan, perbaikan dalam tata kelola perbankan, dan penguatan regulasi pasar modal.

4. Abad ke-21: Era digital dan globalisasi telah membawa tantangan baru bagi regulasi keuangan sektor publik, seperti perluasan aktivitas keuangan lintas batas, pertumbuhan teknologi keuangan (fintech), dan kebutuhan akan perlindungan data dan privasi. Perkembangan ini mencerminkan evolusi regulasi keuangan sektor publik dari periode yang relatif tidak teratur menjadi

sistem yang lebih terstruktur dan kompleks untuk mengatasi tantangan dan risiko dalam lingkungan keuangan global yang berubah dengan cepat.

## **B. REGULASI PUBLIK**

Regulasi publik merupakan ketentuan yang mengatur proses pengelolaan organisasi publik, termasuk pemerintah, partai politik, yayasan, LSM, dan lainnya. Ini mencakup peraturan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam menjalankan aktivitas organisasi tersebut.

Standar akuntansi seperti PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan GAAP (*Generally Accepted Accounting Principle*) penting untuk memberikan pedoman dalam pembuatan laporan keuangan yang dapat dimengerti dan relevan bagi berbagai pengguna informasi, termasuk investor, karyawan, pemerintah, dan masyarakat umum.

Regulasi berkembang, seperti Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, mengatur berbagai jenis organisasi nirlaba seperti yayasan dan partai politik. Berbagai undang-undang, seperti UU No. 17 Tahun 2003, mengatur pengelolaan keuangan negara 10 dan pertanggungjawaban pelaksanaannya. Undang-undang memberikan otonomi kepada daerah, termasuk dalam hal pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berbagai standar, seperti IPSAS (International Public Sector Accounting Standards), PSAK 45P, dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), telah dikembangkan untuk mengatur praktik akuntansi di sektor publik agar lebih transparan dan akuntabel. SPKN menetapkan standar bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara, termasuk persyaratan keahlian, independensi, penggunaan kemahiran profesional, dan pengendalian mutu.

Tahapan penyusunan regulasi publik meliputi identifikasi permasalahan, pembahasan solusi, penyusunan regulasi, diskusi, dan penetapan regulasi. Ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan relevan dan efektif dalam menangani isu-isu yang ada.

Penelitian oleh Neni Machfira dan Tesa Sanjaya menunjukkan pentingnya analisis laporan keuangan sektor publik dan pengaruh regulasi keuangan terhadap penyerapan anggaran. Penelitian oleh Rahmadhani menyoroti perlunya penerapan standar akuntansi publik untuk memastikan ketaatan terhadap peraturan yang ada.

## **KESIMPULAN**

**Regulasi Publik:** Regulasi publik adalah ketentuan yang mengatur proses pengelolaan organisasi publik, dari pemerintah pusat hingga organisasi nirlaba,

dengan tujuan menciptakan ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas kepada masyarakat. Kebutuhan Regulasi dan Standar di Sektor Publik: Pentingnya standar akuntansi dan regulasi dalam organisasi sektor publik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan pengambilan keputusan yang baik. Perkembangan Regulasi di Sektor Publik: Regulasi di sektor publik terus berkembang, termasuk dalam hal yayasan, partai politik, badan hukum milik negara, dan badan layanan umum, untuk memastikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan. Perkembangan Standar di Sektor Publik: Standar akuntansi seperti IPSAS, PSAK 45, dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) telah dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan sektor publik dan meningkatkan transparansi. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN): SPKN menjadi pedoman bagi auditor pemerintah dalam melaksanakan tugasnya untuk memastikan akurasi dan kredibilitas informasi keuangan negara. Penyusunan Regulasi Publik: Proses penyusunan regulasi publik melalui tahapan yang terstruktur dan melibatkan diskusi serta musyawarah untuk memastikan regulasi yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengembangan regulasi dan standar di sektor publik sangat penting untuk mencapai tata kelola yang baik, transparansi, dan akuntabilitas yang diperlukan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan negara secara keseluruhan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. Umsida Press, 1-197.
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010, Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat, Jakarta
- <https://fe.unisma.ac.id/MATERI%20AJAR%20DOSEN/AKTPBLK/ND/REGULASI%20KEUANGAN%20SEKTOR%20PUBLIK%20DI%20INDONESIA.doc>
- <https://fe.unisma.ac.id/MATERI%20AJAR%20DOSEN/AKTPBLK/ND/REGULASI%20KEUANGAN%20SEKTOR%20PUBLIK%20DI%20INDONESIA.doc>
- <https://osf.io/f964j/download/?version=1&displayName=TRANPARANSI%20KEUANGAN%20DALAM%20PABLIK-2018-0516T05%3A42%3A49.300Z.docx>
- Indra Bastian, 2021, Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar. Edisi 3. Erlangga, Jakarta
- Kurniawan, P. S. 2017 PROFESI CERTIFIED SUSTAINABILITY REPORTING SPECIALIST, PELAPORAN KEBERLANJUTAN, DAN TEORI ENTERPRISE (Suatu Tinjauan 13 Mengenai Profesi CSRS dalam Pelaporan

- Keberianjutan). Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 6(1), 10-19.
- Kurular, G. Y. \$. 2020. Tax as a Solution for Climate Change. In Contemporary Issues in Business Economics and Finance (Vol. 104, pp. 165-178). <https://doi.org/10.1108/S1569375920200000104011> Optimizing Product Configuration Problems with Multisourcing Supplier Selections under Machrifah, N., Suharyono, S., & Iskandar, I. (2016). Analisis laporan keuangan sektor publik. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), 1(1), 20-24.
- Pemeriksaan keuangan negara (SPKN) ini terdapat dalam peraturan badan pemeriksaan keuangan republik indonesia nomor 01 tahun 2017 tentang standard pemeriksaan keuangan negara.
- Ramadhani, R., & Setiawan, M. A. (2019). Pengaruh regulasi, politik anggaran, perencanaan anggaran, sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa terhadap penyerapan anggaran belanja pada opd provinsi sumatera barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(2), 710-726.
- Sanjaya, T. (2018). Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, Politik Anggaran Dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Pada OPD Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Akuntansi, 6(3).